BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis kondisi keuangan 22 kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 melalui tiga dimensi, yaitu solvabilitas anggaran, solvabilitas layanan, dan kemandirian keuangan serta keterkaitannya dengan tingkat kemiskinan melalui analisis klaster.

a. Rasio solvabilitas anggaran menunjukkan hasil yang tidak merata. Meskipun rata-rata provinsi masih di atas batas memadai, hampir separuh kabupaten/kota belum mampu membiayai seluruh kebutuhan belanja operasionalnya dari pendapatan terkontrol, bahkan beberapa daerah hanya mampu menutup sebagian kecil kebutuhan tersebut.
b. Rasio solvabilitas layanan menunjukkan ketimpangan antarwilayah yang besar, dipengaruhi oleh perbedaan jumlah penduduk. Terlepas dari perbedaan tersebut, seluruh kabupaten/kota tanpa terkecuali lemah pada belanja modal per kapita, yang mengindikasikan ketidakmampuan mengalokasikan anggaran memadai untuk infrastruktur dan aset publik.
c. Rasio kemandirian keuangan merupakan dimensi paling lemah. Seluruh kabupaten/kota masuk klasifikasi sangat rendah dan tidak ada satu pun yang melampaui batas klasifikasi rendah, mencerminkan ketergantungan fiskal yang sangat tinggi terhadap transfer pemerintah pusat.
d. Solvabilitas anggaran yang relatif lebih baik tidak otomatis menurunkan kemiskinan secara signifikan. Sebagian besar daerah dengan solvabilitas

anggaran di atas rata-rata provinsi masih mencatat kemiskinan yang tinggi, menunjukkan bahwa ketepatan sasaran belanja lebih menentukan daripada besarnya kapasitas anggaran.

e. Tingginya solvabilitas layanan belum mampu menghasilkan penurunan kemiskinan yang berarti. Lebih dari separuh daerah dengan solvabilitas layanan di atas rata-rata provinsi masih mencatat kemiskinan tinggi, karena anggaran per kapita yang besar belum tentu diarahkan pada sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat miskin.

f. Rendahnya kemandirian keuangan di seluruh kabupaten/kota mempersempit ruang fiskal untuk merancang kebijakan pengentasan kemiskinan secara mandiri. Sebagian besar daerah dengan kemandirian rendah juga diiringi kemiskinan tinggi, membentuk lingkaran fiskal yang sulit diputus tanpa intervensi kebijakan yang terstruktur dari pemerintah pusat.

5.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam memahami hasil dan implikasi yang dihasilkan. Pertama, ruang lingkup penelitian ini hanya mencakup kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga hasil analisis dan klasterisasi yang diperoleh tidak dapat digeneralisasi maupun dijadikan perbandingan langsung bagi daerah lain di luar provinsi ini, mengingat setiap provinsi memiliki karakteristik fiskal dan kondisi kemiskinan yang berbeda.

Kedua, penelitian ini hanya menggunakan data satu tahun anggaran yaitu tahun 2023, sehingga hasil yang diperolah hanya mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah dan kemiskinan pada satu titik waktu tertentu. Dinamika perubahan kondisi keuangan dan kemiskinan dari tahun ke tahun tidak dapat ditangkap melalui pendekatan *cross section* yang digunakan dalam penelitian ini.

Ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah, sehingga peneliti tidak memiliki akses langsung ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Keterbatasan akses ini menyebabkan peneliti tidak dapat menggali informasi lebih mendalam mengenai faktor-faktor kontekstual yang melatarbelakangi kondisi keuangan dan kemiskinan di masing-masing daerah, terutama pada daerah yang memiliki rasio keuangan baik namun belum mampu menekan angka kemiskinan.

Keempat, analisis klaster yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *scatter plot* dan matriks kuadran berdasarkan nilai rata-rata sebagai titik pembagi, sehingga pengelompokan daerah bersifat relatif terhadap kondisi internal Provinsi Nusa Tenggara Timur dan tidak mencerminkan standar absolut yang berlaku secara umum.

5.3. Implikasi

a. Implikasi Kebijakan

1. Klaster 1 mencakup daerah-daerah yang memiliki kondisi keuangan relatif lebih baik sekaligus kemiskinan yang relatif lebih terkendali dibandingkan daerah lain dalam provinsi. Tantangan utama bagi klaster 1 karenanya bukan pada penambahan kapasitas fiskal, melainkan pada pemeliharaan kondisi fiskal yang

sudah relatif lebih baik dan peningkatan kualitas alokasi belanja secara berkelanjutan. Implikasi kebijakan bagi daerah-daerah Klaster 1 adalah memperkuat sistem tata kelola anggaran berbasis kinerja dan meningkatkan alokasi belanja pada sektor-sektor yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan, terutama belanja di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar yang selama ini menjadi kelemahan merata seluruh daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Kedua, bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada pada Klaster 2, yaitu daerah dengan kondisi keuangan yang relatif lebih baik namun kemiskinannya tetap tinggi, disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan prioritas belanja daerahnya. Ketersediaan kapasitas fiskal yang relatif lebih baik seharusnya dapat dimanfaatkan dengan mengarahkan alokasi belanja secara lebih tegas pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin, seperti belanja di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Tirtosuharto (2021) menemukan bahwa efisiensi fiskal pemerintah daerah di Indonesia berkorelasi negatif secara signifikan dengan tingkat kemiskinan, dan bahwa dampak belanja modal dalam menurunkan kemiskinan lebih dominan dibandingkan belanja operasional mengisyaratkan pentingnya investasi infrastruktur publik sebagai instrumen pengentasan kemiskinan.
3. Ketiga, bagi pemerintah daerah yang berada pada Klaster 3, yaitu daerah dengan kondisi keuangan yang rendah sekaligus kemiskinan yang tinggi, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih intensif dari berbagai pihak. Upaya penguatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan perlu diprioritaskan guna memperluas ruang fiskal daerah secara bertahap dan berkelanjutan. Namun mengingat

perluasan PAD membutuhkan waktu yang tidak singkat, intervensi jangka pendek yang lebih langsung juga diperlukan secara bersamaan. Rammohan & Tohari, (2023) menemukan bahwa program Dana Desa di Indonesia terbukti berkaitan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga pedesaan dan partisipasi angkatan kerja perempuan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan kemiskinan di wilayah pedesaan terutama melalui investasi infrastruktur pedesaan, pengembangan sumber daya manusia, dan program penciptaan lapangan kerja di tingkat desa. Temuan ini relevan bagi daerah-daerah Klaster 3 di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mayoritas merupakan kabupaten dengan karakteristik pedesaan dominan dan kemiskinan struktural yang dalam: optimalisasi pemanfaatan Dana Desa untuk infrastruktur produktif dan pemberdayaan ekonomi lokal dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan jangka pendek yang efektif, sembari upaya penguatan kapasitas fiskal mandiri melalui peningkatan PAD terus dijalankan secara paralel sebagai fondasi keberlanjutan fiskal jangka panjang.

4. Klaster 4 merupakan kelompok daerah yang menunjukkan kondisi keuangan yang rendah namun kemiskinan yang relatif lebih terkendali. Keberadaan daerah-daerah ini dalam klaster 4 mengisyaratkan adanya mekanisme efisiensi fiskal yang berhasil mempertahankan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi meskipun ruang fiskal sangat terbatas. Posisi ini mengandung risiko laten yang tidak boleh diabaikan: kemiskinan yang selama ini relatif terkendali sangat rentan memburuk apabila terjadi penurunan transfer pusat atau tekanan fiskal yang tidak diantisipasi, mengingat seluruh kapasitas fiskal daerah-daerah ini hampir sepenuhnya bergantung pada dana transfer. Implikasi kebijakan bagi daerah-daerah Klaster 4 adalah dua hal yang harus berjalan bersamaan: pertama, melembagakan dan

menjaga praktik efisiensi belanja yang selama ini terbukti mampu menopang kemiskinan yang lebih terkendali meski dengan keterbatasan fiskal; dan kedua, secara bertahap mengembangkan sumber Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi, serta pengembangan sektor ekonomi lokal yang produktif melalui, sehingga ketergantungan pada transfer pusat dapat dikurangi secara terencana dan kemiskinan yang sudah relatif terkendali tidak kembali meningkat akibat guncangan fiskal dari luar.

b. Implikasi bagi Pemerintah Pusat

Temuan bahwa seluruh 22 kabupaten/kota di NTT memiliki kemandirian keuangan yang sangat rendah mengimplikasikan bahwa kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat masih menjadi penentu utama kapasitas fiskal daerah di provinsi ini. Oleh karena itu, desain skema transfer pusat perlu mempertimbangkan tidak hanya besaran transfer, tetapi juga mekanisme yang mendorong daerah memanfaatkan transfer tersebut secara efektif untuk pengentasan kemiskinan, misalnya melalui transfer berbasis kinerja pengentasan kemiskinan atau pendampingan teknis penguatan tata kelola keuangan daerah.

5.4. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan, berikut beberapa saran yang dapat disampaikan. Pertama, mengingat tingkat kemiskinan di seluruh kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur masih jauh di atas rata-rata nasional, pemerintah pusat perlu memberikan perhatian yang lebih serius dan terstruktur terhadap provinsi ini, tidak hanya melalui peningkatan dana transfer tetapi juga melalui pendampingan dalam penguatan kapasitas fiskal dan tata kelola keuangan daerah agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dalam mendukung program pengentasan kemiskinan.

Kedua, bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada pada Klaster 2, yaitu daerah dengan kondisi keuangan yang relatif lebih baik dalam namun kemiskinannya tetap tinggi, disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan prioritas belanja daerahnya. Ketersediaan kapasitas fiskal yang relatif lebih baik seharusnya dapat dimanfaatkan dengan mengarahkan alokasi belanja secara lebih tegas pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin, seperti belanja di sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Ketiga, bagi pemerintah daerah yang berada pada Klaster 3, yaitu daerah dengan kondisi keuangan yang rendah sekaligus kemiskinan yang tinggi, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih intensif dari berbagai pihak. Upaya penguatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi potensi pajak daerah, retribusi, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan perlu diprioritaskan guna memperluas ruang fiskal daerah secara bertahap dan berkelanjutan.

Keempat, seluruh pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu memberikan perhatian lebih terhadap rendahnya belanja modal per kapita yang ditemukan secara merata di seluruh wilayah. Peningkatan alokasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan perlu menjadi prioritas bersama, mengingat keterbatasan infrastruktur merupakan salah satu faktor struktural yang paling dominan dalam mempertahankan perangkap kemiskinan di wilayah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agussalim, A., Nursini, N., Suhab, S., Kurniawan, R., Samir, S., & Tawakkal, T. (2024). The Path to Poverty Reduction: How Do Economic Growth and Fiscal Policy Influence Poverty Through Inequality in Indonesia? *Economies*, *12*(12), 1–17. https://doi.org/10.3390/economies12120316

Arief, M. Z. (2025). Tantangan, Implikasi, dan Strategi Ketergantungan Daerah Terhadap Dana Transfer Pusat Terhadap Kapasitas Fiskal Daerah. *JURNAL SOSIAL DAN SAINS*, *4*, 68–75. https://www.academia.edu/download/117627859/1444.pdf

Aryanti, E. D., & Sukardi, A. S. (2024). pendapatan terhadap kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economics Research and Policy Studie*, *4*(2), 117–133.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen)*. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html

Badan Pusat Statistik. (2026). *Detail Metadata Indikator Statistik Garis kemiskinan*. https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/13174

Collis, J., & Hussey, R. (2014). *Business Research: A Practical Guide of Undergraduate & Postgraduate Student*. London: Sffron House.

Deffinika, I., Susilo, S., Budijanto, Abdillah, M. N., Kenedy, B. A., Putri, I. W., Az Zachra, A. T., Anggriani, S. D., & Kumalasari, D. (2025). Socio-Spatial Analysis of Poverty: A Comprehensive Study on Integrating Multidimensional Poverty Indices with Geographic Conditions in Krucil District, Probolinggo, Indonesia. *Journal of Population and Social Studies*, *33*, 651–668. https://doi.org/10.25133/JPSSV332025.035

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *The Academy of Management Review*, *14*(4), 532–550.

Fitriah, L. D., & Suryaningrum, D. H. (2023). Peran Mediasi Pertumbuhan Ekonomi pada Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Ketimpangan Pendapatan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, *6*(1). https://doi.org/10.30596/jakk.v6i1.14720

Gauld, R. (2023). *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*. Springer, Cham. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-66252-3_72

Hapsari, M. T., Zamzama, D. A., Sujiatmiko, D. P. S., Umroh, R. U. Z., & Kusumadewi, R. T. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *3*(2), 154–164. https://doi.org/10.62421/jibema.v3i2.175

Jehadut, F. E., & Rustariyuni, S. D. (2025). Analysis of The Determinants of Poverty in East Nusa Tenggara Province. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, *2*(1), 397–416. https://doi.org/10.61132/ijema.v2i1.454

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4). https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X

Kabunggul, Y., & Muhaimin. (2025). Analisis Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Hukum Dan Administrasi Publik*, *3*(2), 3032–0712. https://ejournal.literaaksara.com/index.php/JHAP/index

Kanoli, A. D. S., Syamsul, & Siti, Z. (2023). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol Tahun 2019-2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *6*(8), 1009–1017. https://doi.org/10.56338/jks.v6i8.3993

Kou, Y., & Yasin, I. (2024). Navigating poverty in developing nations: unraveling the impact of political dynamics on sustainable well-being. *Humanities and Social Sciences Communications*, *11*(1), 1–12. https://doi.org/10.1057/s41599-024-03670-6

Larose, D. T. (2014). *Discovering knowledge in data: An introduction to data mining*. Wiley.

Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *59*(1), 1–28. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838

Lhutfi, I., Ludigdo, U., Rusydi, M. K., & Baridwan, Z. (2024). Political economy of accounting (PEA) perspectives on sustainable development goals (SDGs) toward local government's budgeting in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, *10*(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2388170

Mahendra, A., Faridah, & Oktarida, A. (2022). Analisis rasio kondisi keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang pada tahun 2016-2020. *Jurnal Syntax Admiration*, *3*(8).

Mahsun, M., & Sulistyowati, F Purwanugraha, H. A. (2015). *Akuntansi sektor publik*. BPFE.

Malla, M. H., & Pathranarakul, P. (2022). Fiscal Policy and Income Inequality : The Critical Role of. *Economies*, 16.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Masduki, U., Rindayati, W., & Mulatsih, S. (2022). How can quality regional spending reduce poverty and improve human development index? *Journal of Asian Economics*, *82*.

https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101515

Nurias, N., Johari, S. M., Muljarijadi, B., & Wardhana, A. (2023). Reducing the provincial poverty rate in Indonesia: The impact of local government expenditure. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, *24*(2), 297–315. https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.18618

Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

Priambodo, A. P., & Djirimu, M. A. (2024). Government Intervention Strategy in Poverty Reduction. *Jurnal Bina Praja*, *16*(3), 489–508.

Priseptian, L., & Primandhana, W. P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *24*(1), 45–53. https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966

Purnomo, R. A. (2016). *Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS*. Wade Group.

Rahayu, W. S., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Effect of Accountability on the Efficiency of Local Government Expenditures. *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, *8*(2), 177–198. https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.647

Rammohan, A., & Tohari, A. (2023). Rural poverty and labour force participation: Evidence from Indonesia's Village fund program. *PLOS ONE*, *18*(6 June), 1–15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283041

Ritonga, I. T. (2014). *Analisis Laporan Keuangan Pemda*. Penerbit Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah.

Ritonga, I. T., & Buanaputra, V. G. (2022). Developing rules of thumb for the financial conditions of city livability: a study of municipal governments in Indonesia. *Cogent Business and Management*, *9*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2101327

Siburian, M. E. (2022). The link between fiscal decentralization and poverty – Evidence from Indonesia. *Journal of Asian Economics*, *81*. https://doi.org///doi.org/10.1016/j.asieco.2022.101493

Simamora, A. F. M., Deliana, & Napitupulu, I. H. (2024). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2018-2022. *Journal of Accounting and Finance Management*, *5*(4), 795–811. https://doi.org/10.38035/jafm.v5i4.799

Situmorang, R., Suharto, R. S. B., Sanga, M. H., & Mata, R. (2023). *Fiscal Decentralization, Human Development Index, and Infrastructure Toward Poverty in the East Nusa Tenggara Province* (Vol. 2023). Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-202-6_59

Sofyan, A., Nurjaman, K., & Joharudin, A. (2025). Examining Spending Efficiency and Budget Realization Growth in Regional Financial

Performance: A Study of West Java Province. *International Journal of Science and Society*, *7*(1), 434–454. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i1.1392

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tirtosuharto, D. (2021). The impact of fiscal efficiency on poverty reduction in Indonesia: institutional factor and geographical differences. *Journal of Geographical Systems*, *24*(1), 67–93. https://doi.org/10.1007/s10109-021-00359-1

TNP2K, 2020. (2020). *PENGUKURAN GARIS KEMISKINAN DI INDONESIA: TINJAUAN TEORITIS DAN USULAN PERBAIKAN*. https://media.neliti.com/media/publications/641025-buletin-tnp2k-maret-juni-2020-vol-01-no-7c6b3f7f.pdf

Triayudi, A., Pinastawa, I. W. R., & Pratama, J. D. (2024). *Clustering*.

Yati, M. I., & Asmara, J. A. (2020). Analisis rasio kondisi keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang pada tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, *5*(2), 1.

Yozevi, V. B., Mukhlis, M., & Budiono, P. (2026). Peran pemerintah daerah dalam menyesuaikan kapasitas fiskal pasca efisiensi anggaran pemerintah pusat terhadap transfer ke daerah. *Jurnal PAPATUNG*, *9*(3), 89–94.